



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

EVALUASI KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PEMBAGIAN ALOKASI DANA JOMPO DI DESA PULAU KULUR KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SUNDARI BAHTIAR

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan Telp/Fax. 0760-561655
Email: sundry.bahtiar@gmail.com

ABSTRACT

This study is conducted in the chief's office of kulur island kuantan hilir seberang of kuantan singingi. The purpose of this study is to find out how the village head policies in the allocation of the elderly fund in the kulur island village whether it is based on age of the elderly or by family or also upon reciprocity. The formulation of the problem in this study is how the village' chief policy assessments in the allocation of the fund in kulur island village. The informant of this research is the village chief, the village secretary, the village tool and village people of kulur island using a tedium sampling technique. The saturated sample is all the population being sampled, which is all the samples for the inhabitants of the kulur island village community are 12 people. And for the people used simple random sampling, the simple random sampling is the taking of sample members and the population conducted at random without regard for strata within the population. According to the writer's observation that the village's director's decision to allocate the funds in the kulur island village has been well received.

Keywords: Policy Evaluation

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada kantor kepala desa pulau kulur kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan kepala desa dalam pembagian alokasi dana jompo di desa pulau kulur. Apakah berdasarkan usia lansia atau kekeluargaan atau juga berdasarkan balas budi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan kepala desa dalam pembagian alokasi dana jompo di desa pulau kulur kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singingi. Informan dari penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, perangkat-perangkat desa dan masyarakat desa pulau kulur dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling Jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana semua sampel untuk masyarakat desa Pulau Kulur adalah 12 orang. Dan untuk masyarakat digunakan simple Random Sampling, simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan dengan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Menurut pengamatan penulis bahwa evaluasi kebijakan kepala desa dalam pembagian alokasi dana jompo di desa pulau kulur kecamatan kuantan hilir seberang Cukup Baik dilakukan.

Kata Kunci :Evaluasi Kebijakan

1. PENDAHULUAN

Kebijakan terkait lansia di Indonesia diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menitikberatkan pada pemenuhan hak dasar lansia yang meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, kemudahan fasilitas, dan pelayanan sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, sosial, dan perlindungan sosial. Kemudian untuk pelaksanaannya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004. Sesuai dengan amanat undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasinya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas bersumber dari belanja pusat dengan program yang berbasis desa secara merata dengan keadilan. Agar pembangunan memberikan hasil yang sebesar-besarnya, maka seluruh potensi dan sumber daya manusia serta kesempatan yang tersedia perlu dimanfaatkan secara tepat waktu. Bijaksana dan rasional melalui perencanaan yang matang. Kemampuan daerah untuk bertumbuh kembang sangat ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian sangatlah diperlukan untuk mengetahui karakteristik faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah suatu daerah. Kebijakan Kepala Desa dibidang Alokasi Dana Jompo

1. Adanya musyawara tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan desa beserta BPD dalam Rencana Pembagian Dana Jompo
2. Adil dalam membahas dan menyepakati proses pembagian dana jompo
3. Membina kehidupan masyarakat

Sebagaimana dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa. Atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan-pengelolaan desa.

Batasan usia menurut organisasi kesehatan dunia (WHO)

1. Usia pertengahan (middle age) adalah kelompok usia 45-59 tahun
2. Lanjut usia (elderly) antara 60-74
3. Lanjut usiatua (old) antara 75-90
4. Sangat tua (very old) yaitu diatas 90

Batasan umur lansia di Indonesia, batasan mengenai lanjut usia yaitu 60 tahun keatas, dimana ini sesuai dengan undang-undang no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 pasal 1 Ayat 2. Menurut Undang-undang tersebut di atas lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita.

Kemiskinan merupakan konsekuensi ataupun dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu tidak mengheutkan bila aturan mauoun sikap negara terhadap masyarakat miskin diatur dalam undang-undang yang mengatur sikap negara terhadap masyarakat miskin adalah UUD 1945 Pasal 34 ayat 1. UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 berbunyi” Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Kriteria Lanjut Usia yaitu:

1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan
2. Terlantar secara psikis dan sosial

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori administrasi Negara

Secara terminologi apa yang dimaksud dengan administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola, jika dibubuhi oleh awalan *pe* dan akhiran pada setiap arti, kama semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan, apalagi pengaturan dalam terciptanya susunan dan pengaturan dinamikannya.

Administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam tercapainya tujuan bersama (Ali,2015:23)

Secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitudalam arti sempit dan arti luas. Pengertian dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirjho adalah tata usaha atau officework yang meliputi kegiatan catat mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi,kearsipan,dan sebagainya(dalam Ayub,2007:30).

2.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik. Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “ Evaluation”, yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan (Thoha, 1991 : 1).

2.3 Kebijakan Publik

Jika kita menelusuri dalam literatur kepustakaan yang sudah diketahui oleh umum, kata kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu *policy*. Istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

2.4 Etika Administrasi Negara

Dalam buku Wahyudi Kumorotomo (2013:7) Etika berasal dari bahasa Yunani: *ethos* yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral dari bahasa Latin: *mos* (jamak :mores yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah *morale* atau *moril*, tetapi artinya suda sangat jauh berbeda dari pengertian asalnya. Moril bisa berarti semangat atau dorongan batin.

Etika berunjuk kepada dua hal .*pertama* ,etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia serta pembenarannya dalam hal itu merupakan salah satu cabang filsafat. *Kedua*, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat invidu yang khusu ,di luar ketaatan kepada peraturan.

2.5 Pemerintahan Desa

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan sertadapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa bersangkutan.

2.6 Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat diartikan proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada pegawainya. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai yang telah ditetapkan. Kepemimpinan bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penugasan karyawan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif dan kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono 2017:7)

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 42 orang. Untuk perangkat Kepala Desa digunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk perangkat desa pulau Kulur berjumlah 7 orang, dan untuk unsur Masyarakat digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk Masyarakat berjumlah 42 Orang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Efektifitas

Pada indikator Efektifitas dalam Evaluasi kebijakan Kepala Desa Dalam Pembagian Alokasi dana Jompo di desa Pulau Kulur terdapat 4 pertanyaan. Dala indikator ini nilai rata-rata nya mencapai 3,42 yang berada pada skalah Interval 3,41-4,20, hal ini menunjukkan bahwa pada indikator Efektifitas Kebijakan Kepala Desa dalam pembagian Alokasi Dana Jompo di Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah Baik.

2. Indikator Efisiensi

Pada indikator Efisiensi dalam Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembagian Alokasi dana Jompo di Desa Pulau Kulur terdapat 4 Pertanyaan. Dalam indikator ini terdapat nilai rata-ratanya adalah 3,36 yang berada pada skala interval 2,61-3,40, hal ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Dalam pembagian Alokasi Dana Jompo di Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup baik.

3. Indikator Kecukupan

Pada indikator Kecukupan dalam Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Dalam pembagian alokasi Dana Jompo di Desa Pulau Kulur terdapat 4 pertanyaan. Dalam indikator ini nilai rata-

rata nya mencapai 3,52 yang berada pada skala interval 3,41-4,20, hal ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembagian Alokasi Dana Jompo di Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah Baik.

4. Indikator Pemerataan

Pada indikator Pemerataan dalam Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Dalam pembagian Alokasi dana Jompo di Desa Pulau Kulur dengan 4 pertanyaan. Dalam indikator ini terdapat nilai rata-rata nya adalah 3,45 yang berada pada skalah interval 3,41-4,20, hal ini menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan Kepala Desa Dalam Pembagian Alokasi Dana Jompo di desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang adalah Baik.

5. Indikator Responsivitas

Pada indikator Responsivitas dalam Evaluasi kebijakan Kepala Desa Dalam pembagian Alokasi dana Jompo di Desa Pulau Kulur dengan 4 pertanyaan. Dalam indikator ini terdapat nilai rata-rata nya adalah 3,30 yang berada pada skala interval 2,61-3,40, hal ini menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan Kepala Desa Dalam pembagian Alokasi Dana Jompo di Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik.

6. Indikator Kecukupan

Pada indkator Kecukupan dalam Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembagian alokasi dana Jompo di Desa Pulau Kulur dengan 4 pertanyaan. Dalam indikator ini terdapat nilai rata-rata nya adalah 3,30 yang berada pada skalah interval 2,61-3,20, hal ini menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan Kepala Desa Dalam Pembagian Alokasi Dana Jompo di Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik.

Sehingga dari jawaban responden secara keseluruhan beradasarkan rekapitulasi terhadap 6 Indikator diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai rata-rata nya adalah 3,40 yang berada pada skalah interval 2,61-3,40, hal ini menunjukkan bahwa dalam Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembagian Alokasi dana Jompo di Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup baik.

5. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Evaluasi Kebijakan Kepala desa Dalam Pembagian Alokasi dana Jompo di Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan Cukup Baik. Masih ada terdapat kendala-kendala seperti kecemburuan sosial, pembagian Alokasi dana Jompo yang masih tidak tepat sasaran, hal ini dapat dilihat dari berdasarkan penyebaran Kuesioner kepada masyarakat dan hasil wawancara kepada Perangkat Desa Pulau Kulur. Namun untuk hal ini Pemerintahan Desa akan melakukan usaha yang terbaik untuk meningkatkan program Alokasi Dana Jompo yang sudah berjalan di Desa Pulau Kulur ini.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembagian Alokasi Dana Jompo di Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi” maka penlitit memeberikan saran sebagai berikut:

1. Perbanyak mencari informasi bahwa Program Alokasi Dana Jompo ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sesuaikan Nama Program dengan bantuan yang di salurkan kepada Masyarakat sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial.
3. Sesuaikan pembagian Bantuan Alokasi Dana Jompo dengan Data yang valid dan benar.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU:

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara. Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta Pancar Siwah. Adimihardja, Kusnaka & Hikmat, Harry. 2003.
- Participatory Research Appraisal. Pengabdian dan Peb A.R.*
- Mustapadijaja. 1992. *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Perepannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta, LP-FEUI.
- Arief, Syaiful, 2006, *Demokrasi: sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran* Averroes Press, Jakarta.
- erdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Etika Administrasi Negara ; Wahyudi Kumorotomo 2013
- Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono 2017.Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfaeta.
- Winarno.2012. *Kebijakan Publik , Teori, Prose, Dan Studi kasus Edisi & Revisi Terbaru*. CAPS. Yogyakarta Thoha , Mifta. 2008.
- Perilaku Organisasi, konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grapindo Persada Syafii, Inu Kencana.2010 Sistem dministrasi Negara Republik Indonesia
- Riant Nugroho D 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi,dan Evaluasi*
- H.A Tabrani Rusyam. *Membangun efektivitas kinerja kepala desa*
- Prof. D
- r.HU. Husna Asmara (h 128). *Kepemimpinan*
- Hendry Simamora, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Edisi ke-3 STIE YKPN. Yogyakarta

- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan implementasi*. Graha Ilmu Yogyakarta
- Suharno.2010. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Suharno, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan publi*. Bandung : Alfabeta
- Sukarna.2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar maju. Bandung
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persaja.
- Suryana, Siti Erna latifi, 2009. *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatra Utara
- Winarno. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru*. CAPS. Yogyakarta